Analisis Tantangan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor UPT (Unit Pelayanan Teknis) Pendapatan Maros

Ahmad Rosandi Sakir¹, Sri Hariati Mustari²

¹Stisip 17-8-1945 Makassar, ²Stisip 17-8-1945 Makassar

e-mail : ¹ahmadrosandi8@gmail.com

e-mail : ²srimustari@gmail.com

Abstrak. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan utama bagi sebuah Negara yang dibayarkan oleh masyarakat. Pajak juga sebagai iuran pemungutan yang dapat dipaksakan oleh pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Salah satu sumber Pendapatan Daerah berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pajak Kendaraan Bermotor memiliki peranan penting dalam pembangunan daerah, maka sudah sewajarnya jika setiap individu pribadi atau masyarakat pemilik kendaraan bermotor untuk taat dan tepat waktu dalam membayar pajak sesuai dengan undang-undang guna memperlancar program maupun kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan oleh pemerintah daerah. Metode penelitian adalah deduktif kualitatif. Responden adalah kepala UPT Pendapatan Maros dan masyarakat wajib pajak. Hasil penelitian menjelaskan bahwa beberapa faktor yang menyebabkan kurang maksimalnya penerimaan pajak kendaraan bermotor yang pertama adalah kepatuhan masyarakat yang dimana pada kabupaten Maros tingkat kepatuhan masyarakat terhadap pembayana pajak kendaraan bermotor masih rendah di buktikan dengan banyaknya kendaraan yang tidak melakukan daftar ulang. Selanjutnya kinerja aparat yang dinilai masih kurang disiplin dan yang terakhir adalah target yang terlalu tinggi sehingga sangat sulit bagi UPT Pendapatan Maros untuk merealisasikan sampai pada akhir tahun.

Kata kunci: Pajak Kendaraan Bermotor, Pelayanan Publik, Maros.

Abstract, Tax is one of the main sources of revenue for a State paid by the public. Tax is also a voting dues that can be imposed by the government based on the provisions of tax legislation. One of the sources of Regional Revenue comes from Motor Vehicle Tax (PKB). Motor Vehicle Tax has an important role in the development of the region, then it is appropriate if every private individual or community owner of a motor vehicle to obey and on time in paying taxes in accordance with the law in order to expedite programs and activities that have been planned by the local government. The research method is deductive qualitative. Respondents are the head of Upt Revenue Maros and the taxpayer community. The results of the study explained that some of the factors that caused the lack of maximum motor vehicle tax receipts are the first community compliance which in Maros district the level of community compliance faced with the taxation of motor vehicles is still low in evidence with the number of vehicles that do not re-register. Furthermore, the early aparat performance is still lacking discipline and the terakhir is too high target so it is very difficult for upt Maros Revenue to realize until the end of the year..

Keywords: : *Motor Vehicle Tax, Public Service, Maros*

1. PENDAHULUAN

Proses pembangunan negara merupakan suatu proses yang berkesinambungan dan dilakukan secara terencana selaras dengan perubahan-perubahan guna untuk meningkatkan kualitas kehidupan melalui implementasi berbagai kegiatan yang didasarkan pada rencana yang telah ditetapkan. Dalam rangka meningkatkan semua sektor pembangunan yang telah dilaksanakan agar dapat berjalan sesuai dengan rencana untuk menaikkan taraf hidup masyarakat dan mendukung program pemerintah agar terlaksana secara berkesinambungan, pemerintah membutuhkan dana yang cukup besar. Peran pemerintah daerah juga sangat diperlukan guna mengetahui dana yang diperlukan untuk meningkatkan pembangunan daerahnya karena pemerintah daerahlah yang lebih mengetahui kondisi daerahnya.

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting yang menopang program pembangunan dan bersumber dari dalam negeri. Oleh karena itu, pajak sangat menentukan besar kecilnya kapasitas anggaran negara dalam membiayai pengeluaran negara baik untuk pembiayaan pembangunan maupun untuk pembiayaan rutin. Ditambah lagi karena adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 yang bertujuan agar pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah lebih mandiri di daerahnya masing-masing dan mengurang-terhadap pusat, maka dibutuhkanlah serangkaian upaya agar meningkatkan objek pajak yang ada.

Menurut Djajadiningrat yang dikutip oleh Diaz Prantara (2016), pajak adalah kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan kejadian atau perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu tetapi bukan sebagai hukuman menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan tetapi tak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu jenis pajak yang memiliki potensi yang paling besar dalam memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang akhirnya dapat mempengaruhi Pendapatan Daerah. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu jenis pajak yang memiliki potensi yang paling besar dalam memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang akhirnya dapat mempengaruhi Pendapatan Daerah. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) memiliki potensi yang paling besar dikarenakan saat ini transportasi merupakan suatu kebutuhan bagi keseluruhan masyarakat. Transportasi menjadi suatu tuntutan dan keharusan bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari karena memudahkan masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Transportasi saat ini berkembang pesat bukan hanya transportasi umum, namun juga transportasi pribadi. Masyarakat saat ini memilih untuk memiliki kendaraan pribadi dengan pertimbangan kemudahan dan efisiensi. Terlebih lagi dengan banyaknya kemudahan yang diberikan oleh beberapa pihak yang memberikan kredit, dimana dapat memudahkan masyarakat dalam pembelian kendaraan pribadi. Hal inilah yang merupakan salah satu faktor penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor lebih tinggi dibandingkan dengan penerimaan pajak provinsi lainnya. Pada kantor upa pendapatan maros, penerimaan pajak kendaraan bermotor pada tahun 2020 sampai triwulan ketiga masih berada pada angka 65 % dari target yang ditetapkan dari yang

seharusnya sudah mencapai 75% di triwulan ketiga sehingga untuk mencapai 100% di akhir tahun sangatlah sulit. Tujuan Penulisan Artikel ini Untuk mengetahui permasalahan yang terjadi pada penerimaan pajak kendaraan bermotor di UPT Pendapatan Maros dan mengetahui faktor penyebab kurang optimalnya penerimaan pajak kendaraan bermotor pada Upt Pendapatan Maros.

2. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deduktif kualitatif. pendekatan ini dipilih karna penelitian ini berangkat dari sejumlah teori dan pilihan kualitatif, karna semua teori yang digunakan dalam penelitian ini tidak bermaksud untuk di uji , tetapi sebagai pengarah dalam menentukan konteks dan focus penelitian. Jenis penelitian ini dipilih karna peneliti ingin mengembangkan wawancara mendalam untuk menggambarkan optimalisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor pada kantor Upt Pendapatan Wilayah Maros. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober sampai November 2020 di Kabupaten Maros , Provinsi Sulawesi Selatan. Sumber data terdiri dari wawancara langsung , dokumen , dan observasi langsung. wawancara adalah Data yang diperoleh langsung dari informan dengan memakai teknik pengumpulan data berupa interview (wawancara). Informan adalah orang-orang yang betul paham atau pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Informan yang dipilih adalah yang dianggap relevan dalam memberikan informasi. Sedangkan dokumen diperoleh dari Data yang diperoleh dari dokumen – dokumen, catatan – catatan, arsip – arsip, materi – materi, serta literature lainnya yang relevan dalam melengkapi data primer penelitian. Sedangkan Observasi langsung adalah pengamatan/pencatatan yang dilakukan terhadap objek ditempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa sehingga observer berada bersama objek yang diselediki.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejak berlakunya UU Nomor 28 Tahun 2009, pajak kendaraan bermotor dialihkan ke pajak provinsi. Proses pemungutan pajak kendaraan bermotor itu sendiri di lakukan di Kantor Bersama Samsat yang melibatkan tiga instansi pemerintah, yaitu: Dinas Pendapatan Daerah, Polisi Republik Indonesia, dan PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja. Kantor Samsat sendiri didirikan di setiap kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Salah satunya berada di Kabupaten Maros. Dalam pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor (PKB) di Kantor UPT Pendapatan Maros sudah sesuai dengan standar pelayanan artinya tata cara dan prosedur pelayanannya sudah sesuai dengan garis kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan. Dapat dilihat dari prosedur standar yang dilakukan oleh wajib pajak adalah, pada saat jatuh tempo masa pembayaran pajak kendaraan bermotor sebagaimana yang tertera dalam Notice Pajak/STNK, maka wajib pajak diminta untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak kendaraan bermotor. Dan proses pembayaran PKB, pengesahan STNK dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari satu jam sejak saat pendaftaran. Pajak kendaraan bermotor itu sendiri dibayar setiap tahun sekali sedangkan STNK berlaku untuk 5 (lima) tahun tetapi setiap tahun dilakukan pengesahan bersamaan dengan saat

pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB). Namun dalam proses pemungutannya itu sendiri tentu memiliki banyak kendala yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak kendaraan bermotor yang tentu saja tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini di buktikan dari data penerimaan pajak kendaraan bermotor pada kantor UPT Pendapatan Maros sesuai dengan table 1.

Tabel 1
Data realisasi penerimaan pajak kendaraan bulan januari – September

No	Bulan	Penerimaan (Rp)
1	Januari	3.160.335.445
2	Februari	3.417.787.324
3	Maret	3.723.816.475
4	April	2.202.872.555
5	Mei	2.038.914.525
6	Juni	2.274.665.135
7	Juli	3.520.202.260
8	Agustus	3.684.889.773
9	September	3.360.940.100
	Total	27.384.423.592
	Target	42.329.935.000
	Sisa Target	13.945.511.408
	Persentase	65.06%

Sumber : Pendataan UPT Pendapatan Maros

Dari data diatas menunjukkan penerimaan pajak kendaraan bermotor pada kantor UPT Pendapatan Maros sampai triwulan ketiga masih pada angka 65% dari yang seharusnya di Triwulan 3 sudah mencapai angka 75% . hal ini disebabkan oleh beberapa factor antara lain :

a) Kepatuhan Masyarakat

Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara dan kesadaran membayar pajak sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Nugroho, 2006). Masyarakat harus sadar akan keberadaannya sebagai warga negara yang selalu menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum penyelenggaraan Negara.

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana Wajib Pajak mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Menurut Asri (2009) wajib pajak dikatakan memiliki kesadaran apabila:

1. Mengetahui adanya Undang-Undang dan ketentuan perpajakan.
2. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
3. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
5. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan sukarela.
6. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar.

Kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak merupakan perilaku Wajib Pajak berupa pandangan atau perasaan yang melibatkan pengetahuan, keyakinan dan penalaran disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai stimulus yang yang diberikan oleh sistem dan ketentuan pajak tersebut (Fikriningrum, 2012).

Menurut Sapriadi (2013) dan Setiawan (2014), menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak akan perpajakan adalah rasa yang timbul dari dalam diri Wajib Pajak atas kewajibannya membayar pajak dengan ikhlas tanpa adanya unsur paksaan. Dengan kesadaran pajak yang tinggi, kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban pajaknya dapat meningkat. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Suardana (2014) bahwa kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Di kabupaten maros kepatuhan dan kepedulian masyarakat terhadap kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor masih tergolong rendah hal ini di buktikan dengan data kendaraan yang tidak melakukan daftar ulang. Kendaraan tidak melakukan daftar ulang (KTMDU) Merupakan kendaraan yang masa pajak kendaraan nya sudah kadaluarsa atau sudah tidak berlaku lagi. Setiap tahun wajib pajak harus mendaftarkan ulang kendaraan nya untuk menambah masa berlaku untuk satu tahun kedepan .berikut data kendaraan yang tidak melakukan daftar ulang di Kabupaten Maros

Tabel 2
Jumlah Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang 2020

No	Bulan	Roda 2	Roda 4
1	Januari	1295	206
2	Februari	1258	197
3	Maret	1433	241
4	April	1663	327
5	Mei	1913	293
6	Juni	1711	266
7	Juli	2032	316
8	Agustus	2336	337
9	September	2565	377
Total		18.734	3.036

Sumber : Pendataan UPT Pendapatan Maros

Data di atas menunjukkan bahwa setiap bulan nya ada banyak kendaraan yang tidak di daftar ulang atau tidak di bayarkan pajak kendaraan bermotornya rata rata perbulan nya 2.081 unit untuk kendaraan roda 2 dan 337 unit untuk roda 4. Dapat terlihat kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak kendaraan bermotor di kabupaten Maros masih sangat jauh dari apa yang diharapkan

b) Kinerja Aparat

Kinerja Aparat/Pegawai adalah hal yang memiliki sifat individu, karena setiap Pegawai memiliki tingkat kualifikasi yang berbeda dan kinerja yang berbeda dalam kaitannya dengan tugasnya. Manajemen dapat mengukur kinerja pegawai berdasarkan kinerja masing-masing pegawai tersebut.

Kinerja adalah aksi, bukan peristiwa. Yaitu aksi kinerja itu sendiri terdiri dari banyak komponen dan bukan hasil langsung. Pada dasarnya, kinerja adalah sesuatu yang individual, karena setiap karyawan memiliki kemampuan berbeda untuk melakukan pekerjaannya.

Berikut ini adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penilaian kinerja Aparat:

1. Kuantitas Kerja

Kinerja karyawan dapat dipandang sebagai kuantitas kerja. Intinya adalah berapa banyak pekerjaan yang dapat dilakukan dalam waktu yang paling efektif dan efisien. Jika Anda tahu berapa banyak pekerjaan yang dapat dilakukan, berapa banyak nilai, atau tujuan apa yang dapat dicapai ketika tujuan ditetapkan, Anda juga dapat menggunakannya sebagai referensi untuk mengukur produktivitas sumber daya manusia.

2. Kualitas Kerja

Selain jumlah pekerjaan atau kuantitas yang dapat dilakukan dan jumlah tujuan yang dapat dicapai, kualitas pekerjaan Anda sendiri juga merupakan indikator penting dalam kinerja karyawan Anda sendiri. Kualitas yang ditunjukkan di sini adalah seberapa benar dan memuaskan pekerjaan Anda. Kualitas ini berbanding lurus dengan proses pelaksanaan pekerjaan karyawan. Ini dapat didukung oleh ketentuan pedoman yang jelas oleh kepala delegasi kerja.

3. Pemahaman Tentang Pekerjaan

Pengetahuan dan keterampilan adalah hal yang sangat penting yang dimiliki karyawan terkait dengan kinerja mereka dalam suatu pekerjaan. Pengetahuan di tempat kerja dapat dilihat dari latar belakang pendidikan karyawan serta dari pengetahuan yang dapat diberikan perusahaan melalui pelatihan dan platform digital untuk meningkatkan kinerja karyawan. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah pemahaman. Saat merekrut karyawan di perusahaan, pastikan bahwa orang-orang dengan keterampilan yang sesuai dipekerjakan sesuai dengan posisi yang Anda inginkan.

4. Membuat Perencanaan Kegiatan

Perencanaan adalah referensi yang dapat digunakan oleh karyawan dan eksekutif perusahaan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai di masa mendatang. Mengapa hal ini penting? Karena tanpa perencanaan pada awal tahun kerja, sangat sulit bagi karyawan dan perusahaan untuk mengukur jumlah pekerjaan yang akan tercapai. Rencana ini juga dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja karyawan. Selain itu, perencanaan tidak hanya melayani

profesionalisme, tetapi juga dapat digunakan sebagai referensi pribadi untuk seseorang yang menggunakan rencana pengembangan pribadi dan menetapkan tujuan pribadi. Ini penting untuk mengukur kemajuan sumber daya manusia yang bersangkutan. Dan data dari departemen SDM ketika mengevaluasi pekerjaan individu serta pelatihan dan sistem lainnya di perusahaan.

Pada UPT Pendapatan Maros tidak dapat di pungkiri bahwa Kinerja Aparatur juga merupakan salah satu factor penghambat penerimaan pajak kendaraan bermotor kedisiplinan pegawai dalam memberikan pelayanan juga kurang optimal. Masih banyak pegawai yang datang terlambat dan sering menunda pekerjaan utamanya yang berada pada gerai dan kedai samsat. Hal ini di ungkapkan oleh Sukri dalam kutipan wawancara berikut :

“ hal yang paling sering saya sampaikan dalam rapat evaluasi adalah terkait masalah kedisiplinan namun dalam kenyataannya masih ada beberapa pegawai yang terlambat datang sehingga pelayanan sedikit terganggu. Sudah sering juga saya tegur dan saya harap teman teman selalu semangat untuk mencapai target yang telah di tetapkan”

Hal ini juga disampaikan oleh Nirmalasari salah seorang wajib pajak yang datang untuk membayar pajak kendaraan Bermotornya :

“ saya sudah datang sebelum jam 8 karna saya lihat jam pelayanan sudah di buka jam 8 tapi sekarang sudah lewat 30 menit tapi pelayanan belum juga di mulai. Saya juga kurang tahu apakah sudah ada petugasnya atau belum”

Apparat pelayanan sudah seharusnya memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi dan jiwa professional dalam memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat agar penerimaan pajak kendaraan bermotor pada UPT Maros bisa lebih maksimal.

c) Target yang tinggi

Target dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti tujuan, sasaran, yang telah di tetapkan untuk di capai. Dalam dunia pekerjaan target merupakan hal yang sangat penting untuk mengukur kemampuan lembaga atau instansi maupun kinerja pegawai . target di tetapkan dengan beberapa pertimbangan dan kondisi yang ada.

Setiap tahunnya pemerintah juga memasang target terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di setiap UPT Pendapatan. Hal ini lah yang menyebabkan para pegawai yang ada dalam lingkup UPT Pendapatan harus bekerja keras untuk mencapai target yang telah di tetapkan

Target penerimaan pajak kendaraan bermotor pada kantor UPT Pendapatan Maros setiap tahun nya selalu berubah Namun Pada Tahun 2020 Target yang di tetapkan pemerintah sangatlah tinggi hal ini di buktikan dengan data pada table di bawah :

Tabel 3
Target dan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPT Pendapatan Maros

No	Tahun	Target	Penerimaan
1	2015	29.546.550.000	28.923.590.857
2	2016	34.638.980.000	32.573.859.824
3	2017	35.105.455.000	32.981.839.889
4	2018	38.890.849.000	38.746.810.100
5	2019	40.748.453.000	38.948.930.500
6	2020	42.329.935.000	

Sumber : Pendataan UPT Pendapatan Maros

Dari table di atas target yang di tetapkan pemerintah terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor selalu mengalami perubahan dan untuk tahun 2020 target ini dirasa sangat tinggi apalagi pada masa pandemi covid 19 yang juga berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat sehingga juga mempengaruhi terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor.

4. KESIMPULAN

Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada kantor UPT Pendapatan Maros pada tahun 2020 masih belum bisa mencapai target yang telah di tetapkan. Pada triwulan 3 jumlah penerimaan pajak kendaraan bermotor masih berada pada angka 56.06 % yang seharusnya sudah berada pada angka 75% . hal ini di sebabkan oleh beberapa faktor yang pertama kurang pedulinya masyarakat terhadap kewajiban membayar pajak kendaraan bermotornya, hal ini di buktikan dengan masih banyak nya wajib pajak yang tidak melakukan proses daftar ulang atau pengesahan pajak kendaraan bermotor . faktor kedua adalah kinerja aparatur yang dinilai masih kurang disiplin hal ini di buktikan dengan masih ada nya petugas pelayanan yang datang terlambat dan sering menunda nunda pekerjaan. Dan faktor ketiga adalah target yang di tetapkan sangat tinggi sehingga menyulitkan UPT Pendapatan Maros untuk mencapai target yang telah di tetapkan.salah satu upaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak kendaraan bermotor di kabupaten Maros adalah Mengoptimalkan samsat keliling.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, B., Romadhoni, B., Adil, M., & Makassar, U. M. (2020). Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Riset Perpajakan*, 3(1), 15–23.
- AR Sakir, A. R. (2021). Budaya Birokrasi: Kinerja Pegawai Samsat Maros dalam Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan bermotor. 7, 25–35. <https://journal.ildikti9.id/sosiosains/article/view/573/402>
- Kendaraan, N., Di, B., Sulawesi, B. P., & Ngangi, C. R. (2018). This study aims to see the effectiveness and performance of Motor Vehicle Taxation (PKB) and Motor Vehicle Tranfer of Ownership Fee (BBNKB) in BP2RD North Sulawesi Province . The study was conducted at Samsat Office of North Sulawesi Province . The st. 14, 409–424.
- Muchtar, M., & Dkk. (2017). Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Barito. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 1, 385–399.

- <http://202.52.52.22/index.php/jie/article/view/6165>
- Nurgustiani, V. (2017). Pengaruh pemeriksaan pajak dan modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dan Efektivitas Penerimaan Pajak (Survey pada Kantor Pelayanan Pajak di Wilayah Kota Bandung). *i*, 16–45. [http://repository.unpas.ac.id/27475/5/BAB II.pdf](http://repository.unpas.ac.id/27475/5/BAB%20II.pdf)
- Heckman, J. J., Pinto, R., & Savelyev, P. A. (1967). 濟無No Title No Title No Title. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 3(1), 685–694.
- Kolaborasi, I., Daerah, P., Pihak, D., Produksi, T., & Kelapa, P. (2019). *Jurnal Sosio Sains*. 5, 108–114.
- Kurniawan, R. C. (2017). Inovasi Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Daerah. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(3), 569–586. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no3.794>
- Mangkoesebroto, Guritno (2001), *Ekonomi Publik*, Edisi Ketiga, BPFE UGM, Yogyakarta
- Mardiasmo, (2002), *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Penerbit ANDI, Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2009), *Akuntansi Sektor Publik*. Andi, Yogyakarta.
- Munawir, S, (2000), *Perpajakan*, Liberty, Edisi Kelima Cetakan Kedua, Yogyakarta.
- Muhammad Djafar Saidi, 2013, *hukum acara peradilan pajak*, Jakarta : Rajawali Pers
- Nuriyanto, N. (2014). Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Indonesia, Sudahkah Berlandaskan Konsep “Welfare State”? *Jurnal Konstitusi*, 11(3), 428–453.
- Pohan, C.A. 2014b. *Pembahasan Komprehensif Perpajakan Indonesia: Teoridan Kasus*. Bogor: Mitra Wacana Media
- Ratnasari, Nempung, T., & Suriadi, L. O. (2016). Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Sulawesi Tenggara. *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan*, 1(1), 82–95.
- Susanti, N., Cania, S., & Rosya, N. (2020). Strategi Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan Bermotor di kantor Samsat Painan. *Jurnal Ecogen*, 3(2), 344. <https://doi.org/10.24036/jmpe.v3i2.9243>
- Suseka, S. (2017). Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Kantor Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Sintang). *JURNAL PEKAN: Jurnal Pendidikan ...*, 2(1), 44–62. <http://jurnal.stkipersada.ac.id/jurnal/index.php/PEKAN/article/view/196>